

## **Integrasi Sosial Dalam Membangun Keharmonisan Masyarakat**

**Afif Umikalsum**

STAI Nahdlatul Ulama Kotabumi Lampung  
*afief.annajah@gmail.com*

**Fauzan**

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung  
*fauzan@radenintan.ac.id*

**Abstract:** *The realization of a harmonious community life is the goal of every country, including Indonesia. But increasing ethnic identity politics often breaks the harmony. So that the harmonious life of a pluralistic society has a high risk of social conflict. This field research aims to find out the forms of social integration and the factors that influence social integration in Pesawaran District, Lampung Province. Research data obtained by means of observation, interviews, and documentation. Then the data is analyzed descriptively-qualitatively with a sociological-political approach. The results showed that social integration in the community of Pesawaran Regency was normative - functional. Social integration occurs in the cultural dimension and socio-economic dimension. The factors that influence the formation of social integration include tolerance of society, equality of education and economics, geographical location of Pesawaran district, as well as the local wisdom of Lampung's indigenous people. This study concluded that social integration can be formed naturally through the values of wisdom owned by the community. Therefore, it is urgent to develop indigenous wisdom values that are owned by the community.*

**Keywords:** *Social Integration; Assimilation; Society Harmony*

**Abstrak:** *Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis menjadi tujuan setiap negara, tak terkecuali Indonesia. Namun meningkatnya politik identitas suku bangsa seringkali memecah harmoni tersebut. Sehingga kehidupan harmonis*

*masyarakat yang majemuk memiliki resiko yang tinggi terjadinya konflik sosial. Penelitian lapangan ini bertujuan menemukan bentuk integrasi sosial dan faktor-faktor yang mempengaruhi integrasi sosial di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Data penelitian diperoleh dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya data dianalisa secara deskriptif-kualitatif dengan pendekatan sosiologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi sosial pada masyarakat Kabupaten Pesawaran berbentuk normatif – fungsional. Integrasi sosial tersebut terjadi pada dimensi budaya dan dimensi sosial-ekonomi. Adapun faktor yang mempengaruhi terbentuknya integrasi sosial tersebut antara lain sikap toleran masyarakat, kesetaraan pendidikan dan ekonomi, letak geografis kabupaten Pesawaran, serta kearifan lokal masyarakat adat Lampung. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi sosial bisa terbentuk secara alami melalui nilai-nilai kearifan yang dimiliki masyarakat. Oleh karena itu, menjadi urgen untuk mengembangkan nilai-nilai kearifan indigenous yang dimiliki masyarakat*

**Kata Kunci:** *Integrasi Sosial, Assimilasi, Harmoni Sosial*

## **A. Pendahuluan**

Semua orang menginginkan kehidupan masyarakat yang harmonis, termasuk masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, berbagai upaya dilakukan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis, baik oleh perseorangan maupun kelembagaan. Bagi sebagian masyarakat yang homogen dan terdiri dari satu suku bangsa, upaya menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis tidak menghadapi banyak kendala. Namun bagi masyarakatnya yang majemuk (*Plural Societies*), sebagaimana Indonesia,<sup>1</sup> menghadapi kendala cukup serius dalam mewujudkan harmoni masyarakat. Meningkatnya politik identitas suku bangsa seringkali memicu terjadinya konflik antar masyarakat. Sehingga masyarakat yang majemuk memiliki resiko konflik sosial cukup tinggi.

Oleh karena itu, pada masyarakat majemuk semacam ini perlu dibangun integrasi sosial untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis. Dalam hal ini integrasi sosial dimaksudkan sebagai

---

<sup>1</sup>Nur Hadianomo, *Hukum Reintegrasi Sosial, Konflik-konflik Sosial Pri-nonPri dan Hukum Keadilan Sosial* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2004), 34.

proses penyesuaian untuk saling memahami, menerima keadaan, pandangan, dan tindakan dalam satu tatanan kehidupan sosial yang harmonis.<sup>2</sup> Integrasi sosial tersebut akan terwujud apabila masing-masing individu yang berada di dalam suatu kelompok masyarakat dapat mengendalikan prasangka yang ada ditengah masyarakat sehingga tidak terjadi konflik. Sebagaimana masyarakat Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung.

Sebagai salah satu wilayah penempatan transmigran, Kabupaten Pesawaran didiami oleh masyarakat yang cukup beragam. Bukan hanya suku Lampung dan Jawa saja, tetapi juga banyak suku bangsa dari daerah lain yang menetap di daerah ini, seperti Maluku, Batak, Sunda, Banten, Bali, dan lainnya. Namun demikian, ragam suku bangsa dan agama yang ada di Kabupaten Pesawaran tidak menimbulkan konflik horizontal pada masyarakat. Meskipun sejak tahun 80-an secara umum masyarakat adat Lampung mengalami peningkatan identitas, namun masyarakat di wilayah Kabupaten Pesawaran bisa hidup berdampingan. Hal ini berbeda jika dibandingkan dengan beberapa daerah di wilayah Lampung lain, seperti Lampung Selatan, Lampung Utara, Tanggamus, dan Lampung Tengah. Tercatat di beberapa wilayah tersebut pernah terjadi konflik sosial yang disebabkan sentimen suku dan agama. Konflik terakhir dan terbesar adalah peristiwa konflik “Balinuraga” di Kabupaten Lampung Selatan yang terjadi antara etnis Lampung dan Bali.

Kajian tentang integrasi sosial di Indonesia sudah banyak dilakukan. Di antara para pengkaji tersebut adalah Eka Hendry dkk., yang melihat bahwa integrasi sosial pada masyarakat multi etnik atau lintas etnik masih bisa berjalan dengan baik.<sup>3</sup> Anggapan positif tersebut didukung oleh Ernas bahwa integrasi sosial bisa berjalan secara alamiah berdasarkan pada kebutuhan ekonomis.<sup>4</sup> Guna memenuhi kebutuhan hidupnya, masyarakat saling berinteraksi antara

---

<sup>2</sup> Nurman Said, *Masyarakat Muslim Makassar: Studi Pola-Pola Integrasi Sosial antara Muslim Pagam dengan Muslim Sossorang* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat DEPAG RI, 2009), 18.

<sup>3</sup> Eka Hendry Ar. dan dkk, “Integrasi Sosial Dalam Masyarakat Multi Etnik,” *Walisongo* Volume 21, no. 1 (2013): 191–218; lihat juga Hedher Tuakia, “Integrasi Sosial Kelompok Faham Keagamaan Dalam Masyarakat Islam,” *Salam* Volume 18, no. 1 (Juni 2015): 10–20.

<sup>4</sup> Saidin Ernas, “Dari Konflik ke Integrasi Sosial: Pelajaran Dari Ambon, Maluku,” *International Journal of Islamic Thought* Vol. 14, no. 2 (t.t.): 2018.

satu dengan lainnya. Peneliti lain berpandangan bahwa integrasi sosial di Indonesia didukung oleh keberadaan agama dan tradisi (kearifan lokal) sebagai sumber nilai yang memperkokoh terwujudnya integrasi sosial. Sebagaimana Nurman Said yang berpendapat bahwa agama dan tradisi merupakan sumber nilai (kearifan) bagi upaya mewujudkan integrasi sosial.<sup>5</sup> Beberapa peneliti lain menyoroti lebih lanjut tentang pentingnya tradisi (kearifan lokal) bagi integrasi sosial. Para peneliti tersebut antara lain Saidin Ernas,<sup>6</sup> Yudi Hartono,<sup>7</sup> Aini Mufidah,<sup>8</sup> Suparman Jayadi,<sup>9</sup> Nyoman Suryawan,<sup>10</sup> dan Fitri Eriyanti.<sup>11</sup> Beberapa penulis tersebut sepakat bahwa kearifan lokal menjadi media penting bagi terwujudnya integrasi sosial.

Meskipun demikian, ada beberapa kajian yang menyimpulkan adanya ancaman bagi integrasi sosial di Indonesia. Saidin Ernas misalnya, mengingatkan bahwa paham keagamaan radikal dan politik identitas bisa menjadi ancaman bagi integrasi sosial dan kehidupan yang harmonis.<sup>12</sup> Selain itu, Jamaludin dalam tulisanya

---

<sup>5</sup> Nurman Said, "Islam dan Integrasi Sosial: Pergumulan Antara Islam dan Tradisi Masyarakat Bugis," *Tafsere* Volume 3, no. 2 (t.t.): 2015.

<sup>6</sup> Saidin Ernas, Heru Nugroho, dan Zuly Qodir, "Dinamika Integarsi Sosial Di Papua Fenomena Masyarakat Fakfak di Provinsi Papua Barat," *Kawistara* Volume 4, no. 1 (2014): 1–110.

<sup>7</sup> Yudi Hartono dan Dewi Setiana, "Kearifan Lokal Tradisi Uyen Sapi Perajut Integrasi Sosial (Studi Kasus Di Desa Jonggol Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo)," *Agastya* Vol. 02, no. 01 (Januari 2012): 52–65.

<sup>8</sup> Aini Mufidah, "Pengembangan Integrasi Sosial Melalui Kearifan Lokal: Suku Jawa dan Suku Bali di Kampung Rama Utara Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah" (IAIN Raden Intan, 2017).

<sup>9</sup> Suparman Jayadi, "Pemaknaan Simbol-Simbol Tradisi Perang Topat Representasi Integrasi Sosial Masyarakat Suku Sasak: Studi Kasus di Desa Lingsar Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat" (Universitas Sebelas Maret, 2018).

<sup>10</sup> Nyoman Suryawan, "Kearifan Lokal Sebagai Modal Sosial Dalam Integrasi Antara Etnik Bali dan Etnik Bugis di Desa Petang, Badung, Bali," *Jurnal Kajian Bali* Volume 07, no. 01 (2017): 17–32.

<sup>11</sup> Fitri Eriyanti, "Aspek Sosio-Budaya, Kebijakan Pemerintah, dan Mentalitas Yang Berpengaruh Terhadap Integrasi Sosial Dalam Masyarakat Sumatera Barat," *Humanus* Vol. 12, no. 1 (2013): 73–82.

<sup>12</sup> Ernas, "Dari Konflik ke Integrasi Sosial: Pelajaran Dari Ambon, Maluku". Lihat juga Yohanes Yanto Kaliwon, "Problema Integrasi Etnis Terpinggir: Studi tentang Dinamika Sosial dan Politik Suku Bajo di Kampung Wuring Kelurahan Wolomarang Kecamatan Alok Barat Kabupaten Sikka" (Fakultas Politik dan Pemerintahan UGM, t.t.)."

mengidentifikasi bahwa gesekan identitas dan kepentingan antar kelompok bisa memicu terjadinya konflik horizontal antar masyarakat.<sup>13</sup> Sementara Kurniawati menyoroti sisi ekonomi, menurutnya kesenjangan ekonomi bisa menjadi pemicu terjadinya konflik yang menghancurkan kehidupan yang harmonis.<sup>14</sup> Oleh karena itu, Hastuti mengingatkan bahwa integrasi sosial membutuhkan komitmen bersama dalam mengembangkan sikap toleran antar masyarakat.<sup>15</sup> Dari beberapa kajian di atas, belum ada satupun yang meneliti tentang integrasi sosial masyarakat di Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menemukan bentuk integrasi sosial dan faktor-faktor yang mempengaruhi integrasi sosial pada masyarakat di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Penelitian lapangan (field ressearch) ini menggunakan pendekatan sosiologis. Data penelitian diperoleh dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini diharapkan menemukan bentuk atau model integrasi sosial yang sesuai dengan masyarakat Indonesia. Dengan demikian penelitian ini memberikan sumbangan secara teoritis dan praktis bagi upaya mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis.

## **B. Diskursus Teoritis Integrasi Sosial**

Dalam studi sosiologi, teori integrasi sosial berkembang dalam paradigma fungsionalisme struktural yang dicetuskan oleh Talcot Person (1927-1979). Paradigma fungsionalisme struktural ini berasumsi bahwa masyarakat berada dalam sebuah sistem sosial yang mengikat mereka dalam keseimbangan (*ekuilibrium*). Hal itu dapat dilihat dari dua pengertian dasar integrasi sosial, yaitu: *pertama*, pengendalian terhadap konflik dan penyimpangan sosial dalam suatu

---

<sup>13</sup> Adon Nasrullah Jamaludin, "Konflik dan Integrasi Pendirian Rumah Ibadah di Kota Bekasi," *Socio-Politica* Vol. 8, no. 2 (2018): 227–38.

<sup>14</sup> Dewi Kurniawati, "Konflik dan Upaya Pengembangan Integrasi Sosial: Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Sukadana Udik dan Sukadana Ilir Kecamatan Bunga Mayang, Lampung Utara" (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017).

<sup>15</sup> Ruri Puji Hastuti dan Amika Wardani, "Multikulturalisme Dalam Pluralisme Agama (Islam, Budha, Kristen) Untuk menciptakan Integrasi Sosial," *E-Societas* Vol. 6, no. 7 (2017): 1–13.

sistem sosial tertentu, dan *kedua*, menyatukan unsur-unsur tertentu dalam suatu masyarakat sehingga tercipta sebuah ketertiban sosial.<sup>16</sup> Proses ini bertujuan mengintegrasikan kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat dengan cara menjembatani perbedaan-perbedaan yang disebabkan oleh faktor-faktor teritorial/kultur, agama, kepentingan, kelas sosial dan sebagainya, dengan mengurangi kesenjangan yang ditimbulkan oleh faktor-faktor tersebut.

Pengertian tersebut mengisyaratkan bahwa proses integrasi sosial dalam sebuah masyarakat demokratis tidak mengingkari adanya konflik sebagai bagian integral dari fenomena sosial dan perubahan. Sebagaimana dijelaskan Ralf Dahrendrof, bahwa konflik merupakan fenomena sosial yang selalu hadir (*inherent omni presence*) dalam setiap masyarakat manusia.<sup>17</sup> Namun demikian, potensi konflik tidak boleh dihadapi dengan kekuasaan yang hegemonik. Masyarakat dan negara perlu mengelola potensi konflik dengan cara yang bisa diterima oleh semua pihak.

Terma Integrasi sosial yang digunakan dalam penelitian ini melihat perbedaan yang ada pada masyarakat sebagai sebuah realitas politik yang niscaya dan harus dikelola dengan cara-cara yang demokratis. Pandangan demokratis dalam integrasi sosial ini mensyaratkan pentingnya hubungan yang setara dan saling menguntungkan. Bhikhu Parekh menjelaskan bahwa proses integrasi politik dalam sebuah masyarakat demokratis mensyaratkan tiga hal: pertama, adanya kesepakatan dari sebagian besar anggotanya terhadap nilai-nilai sosial tertentu yang bersifat fundamental dan krusial. Kedua, sebagian terhimpun dalam berbagai unit sosial dan saling mengawasi dalam aspek-aspek sosial yang potensial. Ketiga, terjadi saling ketergantungan diantara kelompok-kelompok sosial yang terhimpun di dalam suatu masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi dan sosial secara menyeluruh.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi: Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Modern*, trans. oleh Nurhadi (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2009), h. 258.

<sup>17</sup> Dalam Ritzer dan Goodman, *Teori Sosiologi: Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Modern*.

<sup>18</sup> Bikhu Parekh, *Rethinking Multiculturalism: Keragaman Budaya, dan Teori Politik* (Yogyakarta: Kanisius, 2008), h. 84-87.

Kunci keberhasilan proses integrasi sosial pada masyarakat demokratis adalah adanya kepercayaan (*trust*), pengakuan (*recognition*) atas adanya perbedaan dan hak bagi perbedaan untuk hidup dalam masyarakat, dan kontrak moral (*moral contract*).<sup>19</sup> Kepercayaan mendorong kelompok-kelompok yang berbeda untuk tidak terlibat dalam tindak kekerasan pada yang lain. Sementara pengakuan akan melahirkan sikap toleran terhadap perbedaan. Sedangkan kontrak moral menurut Parekh adalah ketaatan terhadap nilai-nilai yang menjadi platform bersama dalam masyarakat, sehingga membentuk semacam kepemilikan bersama atas nilai-nilai tersebut. Kontak moral ini lah yang pada gilirannya akan menjadi titik temu perbedaan yang harus ditaati dan menjamin tegaknya perdamaian dalam kehidupan masyarakat. Ketaatan pada kontrak moral akan menempatkan masyarakat pada kedudukan yang setara. Hanya masyarakat yang setara yang mampu membentuk masyarakat tanpa diskriminasi.

Selanjutnya, untuk menemukan bagaimana bentuk integrasi sosial yang ada pada masyarakat di kabupaten Pesawaran digunakan pemetaan yang dilakukan Parekh. Dalam hal ini Parekh melihat adanya tiga model integrasi sosial, yaitu: model *proseduralis*, model *asimilasionis*, dan model *millet*. Integrasi model proseduralis memandang keberagaman sosial budaya pada masyarakat sebagai sesuatu yang tidak bisa diabaikan. Solusi untuk mengatasi problematika keragaman tersebut juga tidak bisa dirumuskan begitu saja. Oleh karena itu, untuk menjamin terwujudnya kedamaian dan kestabilan masyarakat, dibutuhkan kehadiran pemerintah sebagai penyelenggara Negara. Kelompok proseduralis memandang bahwa pemerintah harus memberlakukan peraturan umum tentang perilaku yang menjadi pegangan bagi setiap warganya untuk tetap merasa bebas menjalani kehidupan pribadi yang mereka pilih.

Pada sisi lain, integrasi model asimilasionis beranggapan bahwa untuk mewujudkan integrasi sosial, tidak hanya membutuhkan peran struktural, namun juga nilai-nilai kebudayaan yang sama-sama dimiliki masyarakat. Model ini menekankan bahwa kemasyarakatan, kesatuan komunitas terletak pada pembangunan budaya sosial politik yang sama-sama dimiliki. Inti utama model asimilasionis ini

---

<sup>19</sup> Ernas, Nugroho, dan Qodir, "Dinamika Integarsi Sosial Di Papua Fenomena Masyarakat Fakfak di Provinsi Papua Barat."

mengedepankan model dialogis di antara keragaman identitas. Sedangkan integrasi model *millet* menekankan bahwa Negara diharapkan tidak hanya berhenti mencampuri urusan internal, namun juga harus mengakui dan melembagakan otonomi warga dan melaksanakan adat-istiadat kebudayaannya. Diharapkan individu-individu mau memberikan kesetiiaannya kepada komunitas yang bersangkutan yang kemudian ditujukan kepada Negara.<sup>20</sup>

### C. Model Integrasi Sosial Masyarakat Kabupaten Pesawaran

Pesawaran adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Lampung. Sejak masa kolonialisme Belanda (1905-1943), kabupaten ini menjadi salah satu wilayah penempatan transmigran dari Jawa. Jumlah penduduk yang dipindahkan ke provinsi Lampung pada masa ini tercatat sebanyak 206.361 jiwa atau sekitar 51.006 Keluarga.<sup>21</sup> Masyarakat Transmigran yang di datangkan pada masa ini berasal dari beberapa daerah di Pulau Jawa, yaitu Kedu, Banyumas, Kediri, Tulungagung dan Madura, Jawa Timur. Lokasi tujuan penempatan pertama pada periode ini adalah di Gedong Tataan, Kota Agung dan Sukadana. Periode ini berakhir pada Tahun 1943 dimasa Penjajahan Belanda (masa Romusha).<sup>22</sup> Pasca kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah melanjutkan program transmigrasi ke wilayah ini. Penempatan transmigran Jawa di kabupaten ini juga dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia hingga antara kurun waktu tahun 1952 hingga tahun 1968. Jumlah penduduk yang dipindahkan ke seluruh wilayah Lampung pada periode ini sebanyak 221.035 atau 53.166 Keluarga. Mereka berasal dari beberapa daerah antara lain Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali dan Yogyakarta.

Data transmigran di atas menunjukkan bahwa penduduk di kabupaten ini cukup beragam. Bukan hanya dari aspek suku, namun juga ras, agama, serta budaya yang berbeda-beda. Dengan kondisi semacam itu masyarakat di kabupaten Pesawaran ini sejatinya rawan

---

<sup>20</sup> Biku Parekh, *Rethinking Multiculturalism: Keragaman Budaya, dan Teori Politik* (Yogyakarta: Kanisius, 2008), h. 267.

<sup>21</sup> Sabrian, "Data Perpindahan Penduduk," t.t., Museum Transmigrasi, Data Perpindahan Penduduk, diakses 19 Mei 2016.

<sup>22</sup> Sabrian.

terhadap konflik sosial. Jika tidak dikelola dengan tepat, perbedaan suku, agama, ras, budaya yang ada di masyarakat tersebut bisa menjadi sumber konflik sosial. Namun demikian kehidupan di lapangan menunjukkan adanya harmoni antar masyarakat. Artinya terjadi proses integrasi sosial yang apik sehingga kehidupan sosial di kabupaten ini tetap berjalan harmonis, aman, dan damai.

Terciptanya integrasi sosial didukung oleh adanya heterogenitas kultural dan berbagai macam derivasi sosial lainnya yang merupakan kekayaan yang sangat berharga. Perbedaan merupakan faktor determinasi yang memungkinkan eksistensi manusia, masyarakat, bangsa, bahkan alam semesta dapat bertahan.<sup>23</sup> Secara definisi, istilah integrasi berasal dari kata latin “*Integrate*” artinya memberi tempat dalam suatu keseluruhan. Dari kata yang sama dibentuk kata sifat “*Integer*” yang berarti utuh. Dengan demikian integrasi berarti membuat unsur-unsur tertentu menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh.<sup>24</sup> Menurut Hendro Puspito integrasi adalah suatu modus kesatuan hidup bersama dari aneka satuan sistem budaya, kelompok-kelompok etnis dan sosiologis yang berbeda untuk berelasi dan bekerjasama berdasarkan ideologi dan norma dasar yang sama guna menyelenggarakan fungsi sosio-budaya yang lebih tinggi, tanpa merugikan ciri-ciri kebhinnekaan.<sup>25</sup> Pembauran merupakan suatu proses yang mencakup berbagai golongan manusia dengan latar belakang budaya yang berbeda, untuk waktu yang lama secara kontinyu dan intensif saling bergaul sehingga kebudayaan golongan-golongan manusia tadi berubah wujud menjadi satu kebudayaan campuran.<sup>26</sup>

Proses pembauran masyarakat di Kabupaten Pesawaran diawali dengan pemindahan sekelompok masyarakat dari pulau Jawa ke pulau Sumatra yang dipekerjakan mengambil potensi kekayaan alam tepatnya di Provinsi Lampung. Pertama kali penempatan orang-

---

<sup>23</sup> Hamim Ilyas, “Prolog,” dalam *Multikulturalisme dalam Islam: Memahami Prinsip, Nilai, dan Tujuan Multikulturalisme dalam Islam Untuk Mencapai Kualitas Keterpilihan* (Yogyakarta: PPS UIN Sunan Kalijaga, 20009).

<sup>24</sup> Eko Handoyo dan dkk, *Studi Masyarakat Indonesia* (Semarang: FIS UNNES, 2007), 87.

<sup>25</sup> Hendro Puspito, *Sosiologi Sistemik* (Yogyakarta: KANISIUS, 1989), 373.

<sup>26</sup> Hans J. Daeng, *Manusia Kebudayaan dan Lingkungan: Tinjauan Antropologis* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), 279.

orang Jawa ke Lampung adalah di Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran yakni di Desa Bagelen. Wilayah ini merupakan Desa pertama yang didatangi oleh masyarakat Jawa dan diberi nama yang sama dengan desa asal mereka.<sup>27</sup> Menurut Eko Sunu Sutrisno Penyesuaian nama desa oleh masyarakat tersebut dilakukan untuk menghilangkan rasa kerinduan dengan daerah asal mereka.<sup>28</sup>

Tahun 1905, perpindahan masyarakat pertama ini terdiri dari 43 orang dengan jumlah 40 orang laki-laki sebagai pekerja dan 3 orang perempuan sebagai juru masak.<sup>29</sup> Kedatangan para masyarakat dari pulau Jawa ini membawa kebiasaan bertani yang berbeda dengan masyarakat Lampung pada masa itu selain kebiasaan-kebiasaan sosial lainnya. Masyarakat Jawa terbiasa mengolah tanah sawah dengan *alat luku*, yaitu alat yang digunakan untuk mengolah tanah sawah yang ditarik dengan bantuan hewan sapi atau kerbau. Sedangkan masyarakat Lampung biasa menggunakan *garuk*, sebuah alat untuk mengolah tanah yang berbentuk seperti sisir dengan gagang yang panjang cara penggunaannya dengan ditarik oleh tangan. Dari dua cara sederhana yang berbeda ini kemudian masyarakat saling mempelajari dan bekerja sama satu sama lain. Adanya proses dan sistem perkebunan yang berbeda dari para pendatang membuat masyarakat asli mendapatkan tambahan pengetahuan dan cara baru untuk mengolah tanah dan kebun mereka.<sup>30</sup>

Kemudian pada tahun 1926 dilakukan perluasan wilayah perpindahan penduduk.<sup>31</sup> Perluasan penduduk ditahun berikutnya mencapai wilayah lain di Provinsi Lampung yakni: Kota Metro, Sukadana, Gadingrejo, dan Wonosobo.<sup>32</sup> sehingga makin luas lah daerah yang berpemandangan persawahan pada daerah-daerah di Provinsi Lampung seperti desa-desa di Pulau Jawa yang sebelumnya belum ada kawasan persawahan sehingga terjadi *enclave* sosial, pola

---

<sup>27</sup> Eko Sunu Sutrisno, Penanganan Transmigrasi, *Wawancara* 19 Mei 2016, Museum Transmigrasi.

<sup>28</sup> Eko Sunu Sutrisno, Proses Pembauran Masyarakat, *Wawancara*, 19 Mei 2016, Museum Transmigrasi.

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Koentjaraningrat, *Masyarakat Desa di Indonesia* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1984), 337.

<sup>32</sup> Eko Sunu Sutrisno, Persebaran Penduduk Transmigrasi, 19 Mei 2016.

kebudayaan dan pola ekologi yang berbeda di tengah tengah Masyarakat Lampung yang berladang, berkebun kopi dan lada.<sup>33</sup> Ciri utama desa atau daerah yang banyak dihuni oleh penduduk dari pulau Jawa adalah dari nama desa atau daerah tersebut. Biasanya masyarakat pendatang menggunakan nama-nama desa yang sesuai dengan nama desa di Pulau Jawa tempat mereka sebelumnya tinggal.

Demikian pula dengan pengolahan daerah hutan yang luas dengan tanah yang datar di utara Sukoharjo dijadikan pedesaan oleh seorang tua dari masyarakat pendatang yang mempunyai peranan dan mempunyai hubungan dengan orang-orang yang berasal dari marga Anak Tuha (warga Suku Lampung asli).<sup>34</sup> Berjalannya perluasan wilayah perkebunan dan pemukiman di Lampung ini tidak semata-mata menebas dan membuka belukar saja, akan tetapi dengan adanya persetujuan dan kebijakan kepala adat yang memberikan surat izin dan adanya batasan tanah adat<sup>35</sup> maka perluasan wilayah tersebut dapat dilakukan oleh masyarakat pendatang dan bertambahlah desa-desa baru di wilayah tersebut.

Eko Sunu Sutirno menjelaskan bahwa: “kedatangan masyarakat Jawa di Provinsi Lampung ini diterima baik oleh masyarakat dan kepala adat. Nah pembagian tanah itu dilakukan atas izin dari kepala adat. Karna kan ada yang namanya tanah adat, dan itu

---

<sup>33</sup> Koentjaraningrat, *Masyarakat Desa di Indonesia*, 337.

<sup>34</sup> Pudjiwati Sajogyo, *Sosiologi Pedesaan: Kumpulan Bacaan* (Yogyakarta: Gajahmada Universiti Press, 2007), 78.

<sup>35</sup> *Tanah adat* ini, sangat erat kaitannya dengan sejarah dan adat masyarakat Lampung yang terdiri dari beberapa marga yang berakar dari dua jalur pertalian masyarakat adat Lampung yakni Masyarakat adat Lampung Pepadun dan Saibatin. Masyarakat Lampung adat pepadun terdiri dari 1). Abung Siwo Mego mendiami tujuh wilayah adat yakni Kotabumi, Seputih Timur, Sukadana, Labuhan Maringgai, Jabung, Gunung Sugih dan Terbanggi. 2) Mego Pak Tulang Bawang mendiami empat wilayah adat: Menggala, Mesuji, Panaragan dan Wiralaga. 3) Pubian Telu Suku, mendiami wilayah adat Tanjung Karang, Balau, Bukujadi, Tegineneng, Seputih Barat, Padang Ratu, Gedungtataan dan Pugung. 4) Sungkai Way Kanan Buay Lima mendiami wilayah adat: Negeri Besar, Ketapang, Pakuan Ratu, Sungkay, Bunga Mayang, Belambangan Umpu, Baradatu, Bahuga dan Kasui. Sedangkan masyarakat adat Lampung Saibatin/sebatin terdiri dari 1) Peminggir Paksi Pak, mendiami wilayah adat Kalianda, Teluk Betung, Padang Cermin, Cukuh Balak, Way Lima, Talang Padang, Kota Agung, Semangka, Belalau, Liwa dan Ranau. 2) Komerling-Kayuagung (yang sekarang termasuk Provinsi Sumatera Selatan) dinamai Peminggir karena berada di pinggir pantai barat dan selatan. (PojoKlampung.Wordpress.com)

tidak boleh di ganggu gugat.”<sup>36</sup> Demikian penjelasan dari Kepala bagian penanganan Museum Transmigrasi mengenai batasan tanah yang diperbolehkan untuk digunakan oleh para pendatang.

Setelah kemerdekaan Indonesia pemerataan penduduk di Indonesia berlanjut, pemerintah memberlakukan adanya transmigrasi pada tahun 1950 sehingga menghasilkan pembauran antar masyarakat pendatang dan penduduk asli,<sup>37</sup> tak kurang dari 9x9 km luas hutan yang diminta oleh orang-orang Jawa, disebelah selatan pada batas kedua kabupaten, Lampung Tengah dan Lampung Selatan (sebagiannya sekarang adalah kabupaten pesawaran). Daerah izin perintisan pertama itu kemudian menjadi desa-desa Kalirejo, Kaliwungu, dan Sridadi (yang pada awalnya bernama Srikaton). Kalirejolah yang kemudian disebut induk semua desa-desa transmigrasi spontan. Sejarahnya memang menunjukkan perkembangan yang berhasil baik, dari 12 orang penebang pertama (1950), diantaranya 3 orang lampung, menjadi 184 kepala keluarga (1952) waktu untuk Kalirejo diminta pengesahan sebagai “Kampung” dibawah marga Anak Tuha (Pusatnya ketika itu adalah Haduyangratu).<sup>38</sup>

Selain masyarakat dari Pulau Jawa, pendatang yang menetap di Kabupaten Pesawaran juga terdiri dari suku-suku lain seperti suku Padang, suku Batak, Suku Sunda, suku Ogan, suku Palembang, Komerling dan beberapa suku-suku daerah lainnya yang datang ke Provinsi Lampung untuk mengadu nasib dan berlatar belakang ekonomi. Selama masa perpindahan penduduk tersebut, tidak pernah terjadi konflik secara horizontal pada dua unsur masyarakat tersebut seperti yang diungkapkan oleh Eko Sunu Sutrisno bahwa:

“konflik horizontal tidak pernah terjadi, justru malah akulturasi mereka berjalan artinya perkawinan antara penduduk asli dan pendatang malah terjadi. Kebudayaan pun demikian, sekarang bisa kita lihat, sampai sekarang ini masih ada Kuda Lumping Setiap ada hajatan atau sunatan selalu ada yang *nanggap* Kuda Lumping, dan penonton atau

---

<sup>36</sup> Eko Sunu Sutrisno, Persebaran Penduduk Transmigrasi.

<sup>37</sup> Eko Sunu Sutrisno.

<sup>38</sup> Pudjiwati Sajogyo, *Sosiologi Pedesaan: Kumpulan Bacaan*, 88.

penggemarnya tidak hanya *wong jowo*. Artinya hal ini sudah diterima oleh masyarakat banyak.”<sup>39</sup>

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa proses pembauran masyarakat di Kabupaten Pesawaran berjalan dengan baik melalui proses pembauran yang dilakukan masyarakat itu sendiri. Maka jika kita lihat secara umum dalam masyarakat tersebut ada keterikatan dalam dimensi budaya dan sosial ekonomi secara fungsinya.

Dengan adanya proses pembauran antar masyarakat pendatang dan masyarakat asli maka tercipta pola hubungan atau proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat<sup>40</sup>. Dari perolehan data, masyarakat kabupaten Pesawaran berinteraksi dengan baik secara ilmiah dan turun temurun mempertahankan keharmonisan antar masyarakat dengan tetap memegang teguh budaya sendiri dan memahami budaya masyarakat setempat bagi masyarakat pendatang. Masyarakat suku Lampung menerima pendatang dengan sikap terbuka dan menerima dengan baik bahkan mau mempelajari dan memahami budaya-budaya masyarakat pendatang sehingga tak jarang di Desa-desa yang dihuni oleh masyarakat yang terdiri dari masyarakat Lampung, Jawa dan Sunda misalnya di Kecamatan Way Lima, masing –masing dari mereka mampu bercakap-cakap dan berkomunikasi dengan ketiga bahasa tersebut.<sup>41</sup> Hal ini juga sama dengan yang dinyatakan oleh Alkoq Juharnain bahwa:

“kalau di kecamatan Way Lima ada masyarakat yang terdiri dari orang Jawa, Sunda dan Lampung. Semuanya bisa bahasa tiga-tiganya. Jadi kalau berkunjung kesana sulit untuk membedakan apakah dia orang jawa, orang sunda atau orang lampung. Karna semuanya bisa bahasanya”.<sup>42</sup>

---

<sup>39</sup> Eko Sunu Sutrisno, Pembauran Masyarakat, 19 Mei 2016, Museum Transmigrasi.

<sup>40</sup> Sabrian, pola hubungan masyarakat, 20 Mei 2016, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

<sup>41</sup> Zainal Abidin, Pola Pembauran Masyarakat, 23 Mei 2016, Kecamatan Gedongtataan.

<sup>42</sup> Alkoq Juharnain, Pembauran Masyarakat, 18 Mei 2016, Kabupaten Pesawaran.

Keadaan ini menunjukkan bahwa ada sifat kebersamaan dan keterbukaan diantara masyarakat tersebut.

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa Bentuk integrasi sosial yang terjalin pada masyarakat tersebut di dominasi dari dua dimensi utama yaitu:

*Pertama:* Dimensi Budaya. Masyarakat Kabupaten Pesawaran berintegrasi melalui ikatan sosial masyarakat dengan adanya kesepakatan-kesepakatan (*consensus*) antar masyarakat terhadap nilai-nilai dan norma-norma dasar budaya (*basic value and norms*). Disatu sisi masyarakat Jawa sebagai masyarakat pendatang yang dikenal dengan budaya unggah-ungguhnya (yakni menghormati yang lebih tua) memiliki sikap *tahu diri* dan menghormati masyarakat asli, selain itu adanya sikap-sikap sosial masyarakat jawa yang sopan santun dan halus, suka bergotong royong dan tolong menolong berpadu dengan budaya masyarakat lampung yang memiliki sifat terbuka, menerima dan memiliki jiwa kekeluargaan.

*Kedua,* Dimensi Sosial-Ekonomi. Selain adanya kesepakatan yang dilandasi oleh dasar-dasar budaya, integrasi sosial masyarakat Kabupaten Pesawaran juga didukung oleh adanya keterikatan dan ketergantungan antar masyarakat secara fungsional dalam hal-hal sosial ekonomi. Ketergantungan ekonomi ini terbukti dari adanya pola pengolahan perekonomian seperti perkebunan, persawahan dan pertanian oleh kedua masyarakat tersebut secara bersama-sama.

Paparan tersebut diperkuat dengan pernyataan dari Zainal Abidin sebagai berikut: “masyarakat kabupaten pesawaran melaksanakan kebudayaan mereka masing-masing dengan baik dan berinteraksi dengan masyarakat luas dengan baik pula hal ini sudah terjadi secara turun temurun sejak masa kolonial dulu”.<sup>43</sup> Ia juga menambahkan bahwa kunci integrasi sosial yang terjalin antar masyarakat adalah adanya ikatan sosial yang kuat antar masyarakat yang terdiri dari sikap-sikap keterbukaan, kebersamaan dan kekeluargaan. Sehingga masyarakat minoritas tidak pernah merasa dirinya didominasi oleh masyarakat yang mayoritas dalam bentuk agama, ras, maupun suku budaya meskipun secara kuantitas jumlah mereka jauh lebih sedikit.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Zainal Abidin, Pola Pembauran Masyarakat.

<sup>44</sup> Zainal Abidin.

Sementara itu terdapat beberapa pola Integrasi Sosial yang terjadi di Kabupaten Pesawaran, yaitu proseduralis dan asimilasionis kemasyarakatan. Secara prosedural, masyarakat Kabupaten Pesawaran terintegrasi dengan cara yang alami yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri dengan proses pembauran dengan jalan perpindahan penduduk dan transmigrasi. Sehingga dalam hal ini pemerintah daerah di Kabupaten Pesawaran berperan sebagai pemegang kendali untuk menjamin perdamaian dan kestabilan masyarakat agar keharmonisan dan keselarasan dalam kehidupan bermasyarakat tetap terjaga.

Sebagai penjamin perdamaian dan kestabilan masyarakat, pemerintah daerah tidak banyak mencampuri atau bahkan tidak memberlakukan sistem khusus untuk membentuk keharmonisan masyarakat di Kabupaten Pesawaran, pemerintah daerah lebih banyak meyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat di daerah untuk menjalani kehidupan sosial mereka dengan memberlakukan kepala desa dan tokoh adat sebagai fasilitator tempat masyarakat untuk mengadakan keluhan-keluhan terkait permasalahan-permasalahan sosial, budaya dan agama yang kemungkinan terjadi di kabupaten pesawaran.

Sementara secara asimilasi, dua kebudayaan atau lebih saling berhadapan-hadapan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Sehingga memunculkan kebudayaan baru dengan meninggalkan sifat asli. Menurut Shepard, asimilasi dapat diartikan sebagai proses dimana kelompok-kelompok dengan identitas yang berlainan menjadi bersatu padu secara budaya dan sosial.<sup>45</sup> Titik tekan pemahaman asimilasionis kemasyarakatan adalah pada pemisahan antara ranah privasi dan ranah publik. Kelompok ini beranggapan bahwa pribadi-pribadi yang ada dalam masyarakat bebas untuk memilih jalan yang ingin ia jalani, selama itu tidak ditunjukkan di ranah publik.

Pada bentuk ini, masyarakat Kabupaten Pesawaran berintegrasi dengan saling memahami antara satu individu dengan individu yang lainnya. Dalam ranah pribadi masyarakat ini menjalankan kehidupan mereka sesuai dengan kebudayaan mereka masing-masing dan menggunakan bahasa masing-masing. Namun, di

---

<sup>45</sup> Achmad Habib, *Konflik Antar Etnik di Pedesaan* (Yogyakarta: LKIS, 2004), 22.

ranah publik masyarakat berupaya bersatu padu untuk menyelaraskan budaya yang sama yakni budaya masyarakat Lampung. hal ini tercermin dalam aspek pendidikan misalnya dengan adanya pendidikan Budaya, tari, bahasa dan aksara Lampung dalam program muatan lokal di sekolah-sekolah bahkan di tingkat perguruan tinggi tanpa memisahkan suku dan budaya siswa dan pelajarnya<sup>46</sup>. Contoh lainnya adalah penggunaan bahasa yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Way Lima dimana dalam kehidupan bermasyarakat mereka mampu menggunakan bahasa dari tiga suku yang berbeda.

Demikian pula dalam hal pemerintahan, pemerintah daerah tidak ikut mencampuri urusan budaya dan kebiasaan-kebiasaan sosial masyarakat. Pemerintah hanya memberlakukan pemantauan dan pengendalian terhadap perdamaian daerah sedangkan aktor utama pembentuk keharmonisan tersebut adalah masyarakat itu sendiri.

#### **D. Faktor-faktor yang mempengaruhi Integrasi Sosial di Kabupaten Pesawaran**

Jika diamati lebih lanjut, terbentuknya integrasi sosial di Kabupaten Pesawaran tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Adanya toleransi masyarakat yang tinggi, terbukti dengan adanya keharmonisan dari beragam agama dan suku yang mendiami daerah kabupaten pesawaran. Secara teoritis, realitas multikultural merupakan Sunnatullah dan tidak ada satu kelompok manusia pun yang dapat mengingkari dan menghindarinya, maka salah satu sikap yang perlu dikembangkan adalah toleransi.<sup>47</sup> Tingginya sikap toleransi tersebut memicu adanya kesepakatan dalam masyarakat untuk hidup bersama dalam satu wilayah dan menimbulkan adanya integrasi sosial dalam masyarakat.
2. Keselarasan dalam hal Pendidikan dan ekonomi.

---

<sup>46</sup> Sabrian, pola hubungan masyarakat.

<sup>47</sup> Khairul Anam Sidden, *Multikulturalisme Dalam Islam: Memahami Prinsip, Nilai, dan Tujuan Multikulturalisme Dalam Islam Untuk Mencapai Kualitas Keterpilihan* (Yogyakarta: PPS UIN Sunan Kalijaga, 2009), 171.

3. Letak geografis kabupaten Pesawaran. Secara geografis, kabupaten Pesawaran terletak di dekat pusat ibu kota provinsi Lampung. Kabupaten ini juga dianggap sebagai Kabupaten penyangga, sehingga penduduk kabupaten pesawaran sebagian besar merupakan penduduk yang modern dan melek informasi. Selain itu dari data kependudukan, mayoritas penduduk kabupaten pesawaran adalah kaum muda dengan persentase pada kelompok umur 15-60 tahun adalah 62,89%. Dengan demikian efektifitas pemberdayaan terhadap kreatifitas dan produktifitas masyarakat masih sangat tinggi.
4. Sifat kekerabatan dan persaudaraan yang dimiliki masyarakat adat Lampung. Hal ini dijelaskan dalam adat kebiasaan masyarakat lampung yang memiliki sifat-sifat berupa prinsip dasar masyarakat adat lampung yakni *Piil-Pesenggiri*, yang terdiri dari sikap *Sakai Sambayan*, *Nemui-Nyimah*, *Nengah-Nyampur* dan *Bejuluk-Buadok*. Prinsip dasar masyarakat adat lampung tersebut tertulis dalam kitab adat lampung *Kuntara Rajaniti* yang merupakan kitab panduan hidup dan bermasyarakat bagi adat lampung.

Prinsip dasar *Piil Pesenggiri* mengandung makna malu melakukan pekerjaan hina menurut agama serta memiliki harga diri. Prinsip *Sakai Sambayan* berarti gotong-royong dan saling membantu dengan anggota masyarakat lainnya. Prinsip *Nemui-nyimah* mengandung makna saling mengunjungi untuk bersilaturahmi serta ramah menerima tamu. Prinsip *Nengah Nyampur* artinya aktif dalam pergaulan bermasyarakat dan tidak individualistis. Sedangkan prinsip *Bejuluk Buadok* artinya mempunyai kepribadian sesuai dengan gelar adat yang disandangnya.<sup>48</sup>

Sifat prinsip dasar masyarakat tersebut juga diungkapkan dalam *adi-adi* atau pantun:

“Tandani Ulun Lampung, wat Piil-Pusanggiri Muliya  
heno sehitung, wat liyom khega dikhi Juluk-Adok kham  
pegung, Nemui-Nyimah muakhi Nengah-Nyampur mak  
ngungkung, Sakai-Sambayan gawi.”

---

<sup>48</sup> Hilman Hadi Kusuma, “Salinan Kuntara Rajaniti,” 1986, Bandar Lampung.

*Artinya:*

“tandanya orang Lampung mempunyai piil pesenggiri mempunyai malu dan harga diri, gelar adek kita pegang (mempunyai kepribadian yang sesuai dengan gelar adat yang disandang) memiliki sifat nemui nyimah (saling mengunjung dan bersilaturahmi), dan senantiasa mengamalkan sifat sakai sembayan (Gotong royong) dalam setiap pekerjaan.”

5. Modernisasi masyarakat. Sikap saling menghargai dengan kebudayaannya ditandai dengan saling menerima antar masyarakat terhadap kebudayaan lain, dan adanya sikap saling memahami dengan berupaya untuk mempelajari dan memahami budaya-budaya masyarakat yang berlainan.
6. Perkawinan antar penduduk dari kebudayaan yang berbeda, sehingga terciptanya suasana persaudaraan dalam masyarakat.

Dengan demikian berjalannya integrasi sosial di Kabupaten Pesawaran ini didukung oleh faktor internal dan eksternal dalam masyarakat. Faktor internal yang penulis maksud adalah individu dan kelompok masyarakat yang memiliki kesadaran akan adanya perbedaan di lingkungan mereka kemudian berupaya untuk mengambil satu keputusan bersama dengan norma-norma yang berlaku dan menjalin keharmonisan. Sedangkan faktor eksternal yang dimaksud disini adalah adanya pendukung terjalannya integrasi sosial yang berupa kondisi-kondisi alamiah seperti keadaan geografis, wilayah strategis, kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang kemudian membentuk kebersatuan masyarakat dengan cara yang alami.

## **E. Kesimpulan**

Jalannya pembauran masyarakat di Kabupaten Pesawaran terjadi secara alami dengan proses pertukaran pengetahuan antara masyarakat pendatang dan masyarakat asli dalam hal-hal sosial dan budaya tanpa adanya intervensi dari pihak pemerintah dan terciptanya bentuk integrasi *Normatif-Fungsional* dimana masyarakat berintegrasi dengan dorongan norma-norma dasar yang berlaku di masyarakat dan didukung dengan adanya saling ketergantungan masyarakat dalam kebutuhan secara fungsi seperti ekonomi, pendidikan, pengetahuan dan kehidupan sosial lainnya. selain itu

didukung oleh beberapa faktor lainnya yakni sikap toleransi antar masyarakat, kondisi geografis wilayah yang strategis, keselarasan dalam hal pendidikan dan ekonomi serta terjalannya perkawinan antar masyarakat sehingga tercipta komunikasi yang baik antar penduduk. Masyarakat membaur di ranah publik sebagai satu kesatuan namun memiliki ruang pribadi untuk mengekspresikan kebudayaan mereka sehingga mereka tidak kehilangan jati diri yang sebenarnya. Selanjutnya Peran pemerintah Kabupaten Pesawaran dalam hal ini adalah sebagai pengendali dan penjamin kestabilan perdamaian dan keharmonisan. [.]

## Referensi

- Achmad Habib. *Konflik Antar Etnik di Pedesaan*. Yogyakarta: LKIS, 2004.
- Alkoq Juharnain. *Pembauran Masyarakat*, 18 Mei 2016. Kabupaten Pesawaran.
- Ar., Eka Hendry, dan dkk. "Integrasi Sosial Dalam Masyarakat Multi Etnik." *Walisongo* Volume 21, no. 1 (2013): 191–218.
- Bikhu Parekh. *Rethinking Multiculturalism: Keberagaman Budaya dan teori Politik*. Yogyakarta: IMPULS, 2008.
- Eko Sunu Sutrisno. *Pembauran Masyarakat*, 19 Mei 2016. Museum Transmigrasi.
- . *Penanganan Transmigrasi*, 19 Mei 2016. Museum Transmigrasi.
- . *Persebaran Penduduk Transmigrasi*, 19 Mei 2016.
- . *Proses Pembauran Masyarakat*. Wawancara, 19 Mei 2016. Museum Transmigrasi.
- Eriyanti, Fitri. "Aspek Sosio-Budaya, Kebijakan Pemerintah, dan Mentalitas Yang Berpengaruh Terhadap Integrasi Sosial Dalam Masyarakat Sumatera Barat." *Humanus* Vol. 12, no. 1 (2013): 73–82.
- Ernas, Saidin. "Dari Konflik ke Integrasi Sosial: Pelajaran Dari AMbon, Maluku." *International Journal of Islamic Thought* Vol. 14, no. 2 (t.t.): 2018.

- Ernas, Saidin, Heru Nugroho, dan Zuly Qodir. “Dinamika Integarsi Sosial Di Papua Fenomena Masyarakat Fakfak di Provinsi Papua Barat.” *Kawistara* Volume 4, no. 1 (2014): 1–110.
- Hamim Ilyas. “Prolog.” Dalam *Multikulturalisme dalam Islam: Memahami Prinsip, Nilai, dan Tujuan Multikulturalisme dalam Islam Untuk Mencapai Kualitas Keterpilihan*. Yogyakarta: PPS UIN Sunan Kalijaga, 2009.
- Handoyo, Eko, dan dkk. *Studi Masyarakat Indonesia*. Semarang: FIS UNNES, 2007.
- Hans J. Daeng. *Manusia Kebudayaan dan Lingkungan: Tinjauan Antropologis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Hartono, Yudi, dan Dewi Setiana. “Kearifan Lokal Tradisi Uyen Sapi Perajut Integrasi Sosial (Studi Kasus Di Desa Jonggol Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo).” *Agastya* Vol. 02, no. 01 (Januari 2012): 52–65.
- Hastuti, Ruri Puji, dan Amika Wardani. “Multikulturalisme Dalam Pluralisme Agama (Islam, Budha, Kristen) Untuk menciptakan Integrasi Sosial.” *E-Societas* Vol. 6, no. 7 (2017): 1–13.
- Hilman Hadi Kusuma. “Salinan Kuntara Rajaniti,” 1986. Bandar Lampung.
- Jamaludin, Adon Nasrullah. “Konflik dan Integrasi Pendirian Rumah Ibadah di Kota Bekasi.” *Socio-Politica* Vol. 8, no. 2 (2018): 227–38.
- Jayadi, Suparman. “Pemaknaan Simbol-Simbol Tradisi Perang Topat Representasi Integrasi Sosial Masyarakat Suku Sasak: Studi Kasus di Desa Lingsar Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat.” Universitas Sebelas maret, 2018.
- Kaliwon, Yohanes Yanto. “Problema Integrasi Etnis Terpinggir: Studi tentang Dinamika Sosial dan Politik Suku Bajo di Kampung Wuring Kelurahan Wolomarang Kecamatan Alok Barat Kabupaten Sikka.” Fakultas Politik dan Pemerintahan UGM, t.t.
- Khairul Anam Sidden. *Multikulturalisme Dalam Islam: Memahami Prinsip, Nilai, dan Tujuan Multikulturalisme Dalam Islam Untuk Mencapai Kualitas Keterpilihan*. Yogyakarta: PPS UIN Sunan Kalijaga, 2009.

- Koentjaraningrat. *Masyarakat Desa di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1984.
- Kurniawati, Dewi. “Konflik dan Upaya Pengembangan Integrasi Sosial: Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Sukadana Udik dan Sukadana Ilir Kecamatan Bunga Mayang, Lampung Utara.” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.
- Mufidah, Aini. “Pengembangan Integrasi Sosial Melalui Kearifan Lokal: Suku Jawa dan Suku Bali di Kampung Rama Utara Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.” IAIN Raden Intan, 2017.
- NurHadiantomo. *Hukum Reintegrasi Sosial, Konflik-konflik Sosial Pri-nonPri dan Hukum Keadilan Sosial*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2004.
- Nurman Said. *Masyarakat Muslim Makassar: Studi Pola-Pola Integrsi Sosial antara Muslim Pagam dengan Muslim Sossorang*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat DEPAG RI, 2009.
- Parekh, Biku. *Rethinking Multiculturalism: Keragaman Budaya, dan Teori Politik*. Yogyakarta: Kanisius, 2008.
- . *Rethinking Multiculturalism: Keragaman Budaya, dan Teori Politik*. Yogyakarta: Kanisius, 2008.
- Pudjiwati Sajogyo. *Sosiologi Pedesaan: Kumpulan Bacaan*. Yogyakarta: Gajahmada Universiti Press, 2007.
- Puspito, Hendro. *Sosiologi Sistematis*. Yogyakarta: KANISIUS, 1989.
- Ritzer, George, dan Douglas J. Goodman. *Teori Sosiologi: Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Modern*. Diterjemahkan oleh Nurhadi. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2009.
- Sabrian. pola hubungan masyarakat, 20 Mei 2016. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- Said, Nurman. “Islam dan Integrasi Sosial: Pergumulan Antara Islam dan Tradisi Masyarakat Bugis.” *Tafsere* Volume 3, no. 2 (t.t.): 2015.

- Suryawan, Nyoman. “Kearifan Lokal Sebagai Modal Sosial Dalam Integrasi Antara Etnik Bali dan Etnik Bugis di Desa Petang, Badung, Bali.” *Jurnal Kajian Bali* Volume 07, no. 01 (2017): 17–32.
- Tuakia, Hedher. “Integrasi Sosial Kelompok Fahaman Keagamaan Dalam Masyarakat Islam.” *Salam* Volume 18, no. 1 (Juni 2015): 10–20.
- Zainal Abidin. Pola Pembauran Masyarakat, 23 Mei 2016. Kecamatan Gedongtataan.